

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, E. A. 2013. *Proses Pemberian Perpanjangan hak Guna Bangunan Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat (Atas Nama PT. dah Chich Indonesia)* (Doctoral dissertation).
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elza Syarif, (2014), *Menuntaskan Sengketa Tanah*, Gramedia, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Jimmy Joses Sembiring, (2010), *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta : Visi Media.
- Kelsen, Hans. 2013. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Limbong, Bernhard. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka.
- Manan, Bagir. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Maria S.W Sumardjono, (2008), *tanah dalam perspektif hak ekonomi social dan budaya*, Jakarta: Kompas.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nurlinda, Ida. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 33-36.
- Parlindungan, A.P. 2009. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Edisi Revisi), Surabaya: Bina Ilmu, 2021, hlm. 32.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Shidarta, (2013), *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, (2011), *perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. "Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing." Dalam *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, disunting oleh Shidarta, hlm. 345-362. Bandung: Refika Aditama.
- Supriadi, (2007), *Hukum Agraria*, jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. *Kepemilikan Tanah dan Struktur Sosial Pedesaan*. Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 55-58.
- Urip santoso, (2007), *Hukum agraria & hak-hak atas tanah*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Waskito, Hadi Arnowo, (2018), "*Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang*", Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan Ke-2.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Seri Hukum Bisnis: Jual Beli Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winahayu Erwiningsih, Fakhriyasa Zani Sailan, (2019), "*Hukum Agraria Dasar-Dasar Penerapannya*", Yogyakarta: FH UII Press.

Jurnal

- Annisa, Ratna. "Asas-asas Hukum Agraria dalam UUPA." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 15-18.
- Asmara, Budi. "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019.
- Aulia, Anissa, (2016), Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2
- Farida, Anis. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 157–159.
- Gunawan Widjaja. (2006) Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1.
- Ismail, Nurhasan. "Kepastian Hukum Sertifikat Tanah dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 93–95

- Lubis, Yamin. 2008. "Konflik Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria." *Jurnal Equality*, Vol. 13, No. 1, hlm. 89-102.
- M. Yasin Al Arif, "Analisis Yuridis Tumpang Tindih Sertifikat Tanah", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 15.
- Muchtar, Masrudi. 2011. "Sistem Administrasi Pertanahan dan Kepastian Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, hlm. 125-142.
- Mukadir Iskandar, (2014), Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Universitas Suryadarma, Volume 4, Nomor 2.
- Mulyadi, S. (2019). "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda". *Jurnal Yuridis*, 6(1), 147–173.
- Nasution, Bahder Johan. 2010. "Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 29, No. 2, hlm. 23-35.
- Nurlinda, Ida. 2009. "Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 4, hlm. 518-540.
- Permadi, Iwan, (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Jurnal Yustisia* volume 5, Nomor 2
- Rahmat. "Sertifikat Tanah: Fungsi dan Kedudukannya." *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 8 No. 2, 2016.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.
- Satino Mulyadi, 2019, Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, *Jurnal Yuridis*, Vol.6 Nomor 1. hlm. 155
- Setianto, Muhamad Jodi. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Alternatif Dispute Resolution sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Keluarga dan Pertanahan*, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm. 134-152.
- Sihombing, Irene Eka. 2009. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm. 71-78.
- Sumardjono, Maria S.W. 2007. "Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi." *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 12, No. 1, hlm. 1-15.
- Syah, R. (2019). "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai Alat Bukti yang Kuat." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 43–58.

- Wahyuni, Dwi. "Asas Publisitas dalam Pendaftaran Tanah dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 37-39.
- Wargakusumah, Hadi Arnawa. 2012. "Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Jurnal Pertanahan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 41-58.
- Yasmiati, Ni Luh Wayan. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 78-95.
- Yulia Hermawati, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Tanah", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 287.
- Erfamiati, Alifia Devi, Komang Febrinayanti Dantes, and Si Ngurah Ardhya. "Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem." *Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 431-449.
- Yasmiati, Ni Luh Wayan. "Analisis Yuridis Terhadap Cacat Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah dan Upaya Pemulihan Hukumnya." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 3, 2017, hlm. 267-286
- Setianto, Muhamad Jodi. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Alternatif Dispute Resolution Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Keluarga dan Pertanahan*, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm. 134-152.
- Setianto, Muhamad Jodi. "Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pertanahan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 47-58.

SKRIPSI

- Habibur Rahman. (2023). "Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) Prespektif Maqhasid Syariah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1 K/Pdt/2021)" (Skripsi). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Risye Julianti. (2021). "Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara" (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dantes Febrinayanti dan Apsari Hadi, (2021), Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Ppat, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 3

Artikel Elektronik

- Annisa Fianni Sisma, (2023), 7 Asas Hukum Agraria di UUPA, terdapat pada <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilahekonomi/64f7f43046eac/7-asas-hukum-agraria-di-uupa>, Di akses pada tanggal 23 April 2025
- Husnul Abdi, (2023), Bunyi UUD Pasal 1 Ayat 3 dan Penjelasan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Terdapat pada: [Bunyi UUD Pasal 1 Ayat 3 dan Penjelasan Indonesia Sebagai Negara Hukum - Hot Liputan6.com](https://hotliputan6.com), Di akses pada tanggal 22 April 2023
- Syaiful Bahari, (2010), Tanah sebagai Fungsi Sosial versus Komoditi dalam Perspektif Politik Hukum Agraria, Terdapat pada : <http://www.binadesa.or.id>. Di akses pada 20 April 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang mengatur tata cara peradilan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam perkara perdata.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang berkaitan dengan tata ruang dan penggunaan tanah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Konflik Tata Ruang.